**“KEKUATAN BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU
DALAM SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
JEPARA”**

(Studi Kasus Perkara Nomor: 1225/Pdt.G/2021/PA.Jepr)

Vijar Pribowo

vijarpribowo08@gmail.com

Universitas Muria Kudus

Abstrak: Dalam Penelitian ini mengenai kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu dalam perkara gugatan perceraian pada Putusan Nomor 1225/Pdt.G/2021/PA.Jepr adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam perkara gugatan perceraian pada Putusan Nomor 1225/Pdt.G/2021/PA.Jepr. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa majelis hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*). Persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Selain itu, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 membenarkan testimonium de auditu secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi de auditu terdiri dari beberapa orang. Meskipun Kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu yang dikonstruksikan sebagai persangkaan merupakan bukti bebas, tetapi pada perkara ini keterangan saksi tersebut penting sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bukti yang menentukan karena para saksi de auditu berperan besar dalam dikabulkannya gugatan Penggugat.

Kata Kunci: Pembuktian, Perceraian, Testimonium De Auditu.

Abstract: *In this research, the strength of the evidence of the witness testimonium de auditu in the divorce lawsuit case in Decision Number 1225/Pdt.G/2021/PA.Jepr is to determine the strength of the evidence of the Witness Testimonium De Auditu in the divorce lawsuit case in Decision Number 1225/Pdt.G/ 2021/PA.Jepr. Based on this research, the results obtained were that the panel of judges based the jurisprudence on Supreme Court Decision number 308 K/Pdt/1959 dated 11 November 1959 that testimonium de auditu cannot be used as direct evidence but that testimony can be used as presumptive evidence (*vermoeden*). This assumption can be used as a basis for proving something. Apart from that, the Supreme Court in decision number 239 K/Sip/1973 dated 25 November 1975 confirmed testimonium de auditu exceptionally as evidence that meets the material requirements if the witness gives a statement under oath, the statement is accepted as independent evidence up to the minimum limit. proof without requiring the help of other evidence if the de auditu witness consists of several people. Although the evidentiary strength of the testimonium de auditu witnesses which are constructed as allegations is independent evidence, in this case the testimony of these witnesses is important so that the strength of the evidence is decisive evidence because the de auditu witnesses played a major role in the granting of the Plaintiff's claim.*

Keywords: Evidence, Divorce, Testimonium De Auditu.

PENDAHULUAN

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkontantir, mengkualifisir dan mengkontituir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Karena itu pembuktian dibuktikan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan suatu kepastian tentang kebenaran yang dikemukakan.

Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dihadapan hakim atau pengadilan. Dengan kata lain membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Pembuktian ini memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian hukum tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat didalam Rbg dan HIR. Secara materil hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat tersebut.

Sebagai negara dengan penduduk terbesar yang ditandai dengan kehadiran kepadatan penduduk, maka dari itu Indonesia negara hukum karena masih menganut hukum lama dan hukum peninggalan belanda, ketika kita membahas tentang perkawinan adalah hal yang sangat lazim dan termasuk kebutuhan setiap insan manusia, menindaklanjuti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Junto Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat ketika ingin bercerai maka dapat diajukan di Pengadilan Agama.

Proses persidangan dipertemukan antara Penggugat dan Tergugat melalui sidang pertama, selepas itu dapat dilanjutkan untuk mediasi melalui ruang mediator, akan tetapi mediasi tidak berhasil serta tidak adanya kepastian hukum, maka akan dilanjutkan dengan sidang agenda lainnya mengenai alur Pengadilan Agama yaitu Jawaban Tergugat hasil mediasi, selepas itu sanggahan melaui Replik dari Penggugat dan selanjutnya Duplik dari Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat untuk menyiapkan agenda saksi, dan hingga akhirnya sidang kesimpulan hingga pembacaan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakanlah analisa terhadap data yang telah ada dan diperoleh. Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati.

Penelitian ini menggunakan metode Doktrinal atau sering disebut yuridis normative yaitu metode yang menggunakan data research (penelitian kepustakaan) untuk mendapatkan berbagai konsep sebagai data yang utama mengenai kekuatan bukti saksi testimonium de auditu dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Jepara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Berdasarkan Saksi Testimonium De Auditu Di Pengadilan Agama Jepara.

Dalam proses persidangan dapat memahami dalam hal pentingnya pembuktian dalam hukum acara perdata karena sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Salah satu alat bukti

perkara perdata adalah saksi. Khususnya dalam perkara perceraian terkadang saksi dari penggugat/pemohon mengandung unsur testimonium de auditu, yaitu kesaksian atau keterangan dari saksi yang tidak mengetahui langsung penyebab pertengkaran penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon tetapi hanya mendengar cerita dari penggugat/pemohon saja, sehingga kesaksian de auditu hanya dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.

B. Putusan Hakim Berdasarkan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara

Gugatan perdata cerai talak / cerai gugat (gugatan contentiosa) dalam perceraian yang beragama Islam merupakan suatu gugatan yang diajukan Pengadilan Agama berupa permasalahan hukum mengandung sengketa (disputes, differences), dengan komposisi berupa pihak petama sebagai penggugat / pemohon sedangkan pihak kedua sebagai tergugat / termohon.

Perkara Nomor 1225/Pdt.G/2021/PA.Jpr perceraian karena perselisihan terus-menerus antara keduanya hingga tidak ada harapan rumah tangga hidup rukun sebagaimana diatur Pasal 39 Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini Termohon / Penggugat Rekonvensi sebenarnya tidak mampu menghadirkan saksi yang memberi kesaksian sempurna. Saksi tersebut memberi keterangan berdasar cerita (informasi) dari Termohon / Penggugat Rekonvensi yang dikenal sebagai Testimonium De Auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain

Memahami dari pihak yang berperkara alat bukti merupakan suatu alat atau upaya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara agar dapat meyakinkan hakim di Pengadilan. Sehingga Pengadilan dapat menilai dalam memeriksa perkara dipandang apakah alat atau upaya yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Sehingga alat bukti tersebut sangat dibutuhkan para pencari keadilan ketika sedang mencari kebenaran di Pengadilan. Salah satu alat bukti dalam proses pembuktian dipersidangan yaitu alat bukti saksi. Alat bukti saksi merupakan kesaksian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan pemberitahuan secara lisan yang mengetahui peristiwa dan yang dapat melihat dan mendengarkan pribadi.

Hakim dapat memahami dan menilai proses beracara di Pengadilan terlebih dahulu mencermati dan meneliti suatu perkara yang disengketakan sebelum kemudian menjatuhkan putusan. Proses beracara itu tentu tidak lepas dari masalah pembuktian, karena dari sana Hakim mendapatkan gambaran jelas mengenai perkara yang dipermasalahkan dan sekaligus memberikan kepastian kepada Majelis Hakim terhadap terjadinya suatu peristiwa dengan menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum. Pembuktian ini diperlukan agar tidak saling menuduh satu dengan yang lainnya tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah, dan gugatan yang asal gugat ataupun Vexatious Litigation.

Hakim sebagai wadah organ Pengadilan dianggap memahami hukum, Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam mencari keadilan datang ke Pengadilan untuk mohon keadilan. Andaikata hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka Hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara. Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting yang tidak terpisahkan, sehingga dalam proses penyelesaian suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Hakim. Dengan pembuktian ini diharapkan dapat dibuktikan suatu kebenaran yang sesungguhnya terhadap masalah yang menjadi sengketa diantara para pihak, sehingga majelis hakim dapat mengadili dan menyelesaikan sengketa itu dengan benar, adil dan sesuai menurut hukum Islam.

Eksistensi saksi de auditu pada proses penyelesaian suatu perkara ditinjau menurut Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia berada di luar kategori keterangan saksi yang ditentukan Undang-Undang. Namun, tidak serta merta saksi de auditu tersebut harus ditolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali, dalam keadaan tertentu saksi de auditu dapat diterima sebagai alat bukti dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut serta dipertimbangkan dari kondisionalnya tanpa melepas keadaan yang melekat dan mengitarinya, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

KESIMPULAN

Dari penelitian dan analisis penulis tentang "Kekuatan Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara" (Studi

Kasus Perkara Nomor: 1225/Pdt.G/2021/PA.Jepr) yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

- a. Majelis Hakim keterangan saksi 1 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi 2 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Pertimbangan Hakim menerima saksi serta alat-alat bukti yang lain adalah pada keterangan saksi. Uraian di atas menjelaskan bahwa kekuatan hukum pembuktian saksi testimonium de auditu perlu dikuatkan dengan bukti lain, karena sifatnya yang hanya sebagai bukti permulaan. Melihat hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Agama Jepara Putusan Nomor: 1225/Pdt.G/2021/PA.Jepr yang menjatuhkan putusan dengan dasar hanya dari dua saksi Penggugat Rekonvensi / Termohon testimonium de auditu.
- b. Atas pertimbangan Hakim tersebut, maka Penulis dapat menganalisis bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat materil sebagai sebuah kesaksian. Karena saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan salah satunya adalah saksi tidak mengetahui perkara tersebut karena saksi tidak mendengar, tidak pernah melihat atau tidak pernah mengalami sendiri suatu kejadian, oleh karena itu pada saat memberikan kesaksian, saksi di tanya Majelis Hakim dari mana saksi mengetahui kejadian yang di persaksikan di depan Pengadilan.
- c. Kemudian dalam pembuktian yang dihadirkan Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam persidangan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan dengan yang aslinya, Termohon / Penggugat Rekonvensi hanya mempunyai berupa foto copy, dan kehadiran saksi yang di hadirkan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi hanyalah berdasarkan cerita (informasi) yang dimana tidak mengetahui batas dan letaknya. Oleh maka dari itu apa yang dihadirkan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi hanya dipersangkakan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, saksi hanya berdasarkan cerita dan bukan melihat, mendengar, sehingga hakim menolak alat bukti yang dihadirkan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi.
- d. Penyampaian mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 1225/Pdt.G/2021/PA.Jepr yang menerima saksi testimonium de auditu maka menurut Gustav Radbruch dapat diketahui bahwa hakim mengutamakan /memprioritaskan tujuan hukum Teori Gustav Radbruch mengenai 3 dasar nilai hukum yang mana tujuan hukum adalah kepastian hukum (normatif), kemanfaatan (sosiologis) dan keadilan (filosofis). Menurutnya, tatanan kebiasaan dalam masyarakat dengan hukum seringkali tidak sesuai. Jika kebiasaan mutlak berpegang pada kenyataan tingkah laku orang, maka hukum justru berpegang pada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Nilai dasar kemanfaatan inilah yang akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, namun juga kemanfaatan serta keadilan.

Saran

1. Hendaknya praktisi hukum Pengadilan Agama Jepara khususnya dan semua lembaga Peradilan Agama pada umumnya berani memikul tanggung jawab dalam menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkrit dengan berperan sebaik-baiknya dalam mengantisipasi perubahan nilai - nilai dalam masyarakat.
2. Mengenai aturan-aturan mengenai pembuktian yang letaknya tersebar dan terpisah dalam beberapa ketentuan perundang-undangan (HIR, R.Bg, KUH Perdata) perlu dilakukan suatu

unifikasi terhadap aturan-aturan tersebut dan kalau perlu dibuat semacam peraturan mengenai pembuktian dan penerapannya di lembaga Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

95, Bandung

- A.Mukri Agafi dan Ropaun Rambe, 2001, Implementasi Hukum Islam, PT. Perca, Jakarta
- A.Rasyid H. Roihan, 1994, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada,
- Abidin Abu Bakar, Zainal, 1993, Kumpulan Perundang – undangan Dalam Lingkup
- Adreae Fockema, 1983, Kamus Hukum Fockema Andrae (terj), Bina Cipta, Bandung
- Alfitra, 2014, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia,
- Ali Achmad, 2012, Hukum Pembuktian Perdata, Edisi Pertama. Cetakan ke – 1, Jakarta
- Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Cet. I,
- Arto Mukti, 2000, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar Offset,
- Asnawi M Natsir, 2013, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, UII Pers,
- Bakhri Syaiful, 2012, Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan, Gramata
- Bayu Alif Ahmad Yasin Ahmad Nabil Atoilah, 2021, "Kesaksian Non Muslim dalam Perkara
- Bisri Cik Hasan, 1996, Peradilan Agama di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1,
- Cet,4 Raih Asa Sukses, Jakarta
- Cet. III, Jakarta
- Effendi Bachtiar, 1991, "Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata", Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Eri Safira, Martha, 2017, "Hukum Perdata", Ponorogo, CV. Nata Karya
- Gatot Sopramono, 1993, "Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama", Alumni, Bandung,
- Hadikusuma Hilman, 1997, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung
- Harapan Yahya, 2009, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta
- Hutagalung Sophar Maru, 2010, Praktik Peradilan Perdata, Teknis Menangani Perkara di
- Idris Ramulyo Mohd, 2002, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta.
- Imron AM, 1998, Peradilan Agama Dalam Islam. Cet. III, Bina Ilmu Surabaya
- Iskandar Oeripkartawinata, Ny, Retnowulan Sutantio, 1997, Hukum Acara Perdata dan Dalam Praktek Teori, Mandar Maju, Cet. III, Bandung
- Jakarta
- Kiay Rizky Perdana, 2016, Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, Lex Privatum, Demak.
- Makarao Moh. Taufik, 2009, Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata, Cet. II, Rineka Cipta, Jakarta
- Mannan Abdul, 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. 5, Kencana, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Cet.6, Yogyakarta
- Mulyadi Lilik, 1999, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Djambatan, Jakarta
- Munawwir, A.W. 1984, Kamus Al – Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap, Cet. I, Pesantren Al Munawwir, Yogyakarta
- Nasution, 2009, Khoiruddin Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Academia, Tazzafa, Yogyakarta
- Natsir Asnawi M, 2013, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, UII Press, Yogyakarta
- Noh H. Zaini Ahmad, 1983, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia, Bima Ilmu, Cet. I, Surabaya
- Nur Rasai M, 1999, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Offset, Cet ke – 2, Jakarta
- Pengadilan, Cet. Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Peradilan Agama, Al Hikmah, Cet III, Jakarta
- Perceraian menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama", Istinbath Vol 16, No 1,

Publishing, Jakarta

Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta

R. Tjartosudibio Subekti R, 2003, Kitab Undang – undang Hukum Perdata (Kuh Perdata), Pradaya Paramita, Jakarta

S.M, Amin, 1981, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Keempat, Pradnya Pranata, , Jakarta

Samudera Teguh, 1992, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung

Sarwono, 2014, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Cet. 4 Ed. 1, Sinar Grafika, Jakarta

Sasangka Hari, 2005, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi, CV Mandar Maju, Bandung

Solahuddin, 2008, Kitab Undang – undang Hukum Pidana Acara Pidana dan Perdata, Cet. I, Visimedia, Jakarta

Subekti, 1996, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta

Syahrani Riduan, 1991, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung

Th. Wismar An Marzuki Sulaikin Lubis dan Gemala Dewi, 2006, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Cet. II, Kencana, Jakarta

Wiwie Heryani Achmad Ali, 2012, Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata, Cet I, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Yahya Harahap, 2015, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Jurnal

Asmuni, Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 2, Juli 2014, 191-202, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, Cet. II, Jakarta, Balai Pustaka, 1991

Dita Wardhani Muntalib, Yusdani, Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/Puu-VIII/2010)

Ihdi Karim Makinara Jamhir, Sarah Fadhilah, Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020

M. Muallih, Negara Hukum Indonesia dalam Perpektif Teori Hukum, Gustav Radbruch, Jurnal Legalias, 2013, Volume IV Nomor 1

Novita Dyah Kumala Sari Dkk, Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, (Studi Putusan Nomor : 216/Pdt.G/PA.Sgt), Jurnal Verstek, Vol IV, No.3 Desember 2016

Nur Ikawahyudi Basri dan Hasnawi Haris, Peran Saksi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Talakar, Jurnal Tomalebbi Jurnal Pemikiran, Jurnal Hukum, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 2 September 2015

Nurfaradilla Ananda, Implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda, Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris. Eissn, XXXX –XXXX Vol, No 1, Juni 2022

Ramadani Wahyu Sururie, Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian, Kajian Putusan Nomor 014/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg, Naskah diterima 24 Maret 2014, revisi 6 Agustus 2014, disetujui 8 Agustus 2014, Jurnal Yudisal Vol 7 No 2 Agustus 2014, 137 -155

Yaser Amri Azwir dan Arin Christiana, Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang – undangan dan Ekonomi Syariah, Juli – Desember 2018

Undang – Undang

HIR

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UUD 1945

Wawancara

Sudjadi, 21 Desember 2022, Pengadilan Agama Jepara

Internet

www.hukumonline.com/pustakadata/download/f153195/parent/27288 hir, akses 2 Maret 2022